

## ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TERHADAP EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS TATA KELOLAH ANGGARAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR PENDIDIKAN PEMERINTAH SULAWESI SELATAN

### *Analysis Of Regional Development Income Budget Towards Efficiency And Effectiveness Of Development Budget Government Government Sector South Sulawesi*

Nurhidayanti. S<sup>1</sup>, Muhlis Ruslan<sup>2</sup>, Firman Menne<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa

E-mail: [muhlis.ruslam@universitaspbosowa.ac.id](mailto:muhlis.ruslam@universitaspbosowa.ac.id)

Diterima 10 Juli 2018/Disetujui 4 Desember 2018

#### ABSTRAK

Lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan pada 2013-2015. Analisis pengukuran menggunakan Aspek Keuangan dan Nilai Untuk Uang efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana: (1) konsistensi antara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan realisasi pengelolaan anggaran pembangunan sektor pendidikan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam hal aspek keuangan, (2) tingkat efisiensi dan efektivitas alokasi pengelolaan anggaran pembangunan di sektor pendidikan dari Anggaran Belanja Daerah dilihat dari realisasi anggaran, rencana pengeluaran dan realisasi belanja sektor pendidikan di pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat konsistensi antara anggaran belanja daerah dan realisasi pengelolaan anggaran pembangunan di sektor pendidikan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal aspek keuangan, (2) tata kelola anggaran pembangunan di sektor pendidikan yang dialokasikan dari anggaran belanja Dalam hal realisasi anggaran, rencana pengeluaran dan realisasi pengeluaran sektor pendidikan di pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dikatakan efisien dengan nilai lebih dari 90% dan tingkat efektivitas dengan memperhatikan hasil yang dicapai.

**Kata kunci:** Efisiensi dan efektivitas, APBD, tata kelola anggaran pendidikan, sul-sel.

#### ABSTRACT

Research location in South Sulawesi Province in 2013-2015. Measurement analysis uses Financial and Value For Money Aspects of efficiency and effectiveness. This study aims to analyze how: (1) the consistency between the Regional Expenditure Revenue Budget and the realization of the education sector development budget management of the South Sulawesi provincial government in terms of financial aspects, (2) the level of efficiency and effectiveness of the allocation of development budget management in the education sector from the Regional Expenditure Budget seen from the realization of the budget, expenditure plans and realization of the education sector expenditure in the South Sulawesi provincial government. The results of this study indicate that: (1) there is consistency between the regional expenditure budget and the realization of the development budget management in the education sector of the government of South Sulawesi Province in terms of financial aspects, (2) governance of the development budget in the education sector allocated from the expenditure budget In terms of budget realization, the expenditure plan and realization of the education sector expenditure in the provincial government of South Sulawesi are said to be efficient with a value of more than 90% and the level of effectiveness by paying attention to the outcome achieved.

**Keywords:** Efficiency and effectiveness, APBD, governance of education budget, Sul-Sel.

#### 1. PENDAHULUAN

Perencanaan dan pengalokasian anggaran menjadi sangat penting untuk membiayai program pemerintah guna menaikkan kuantitas dan kualitas pendidikan. Dimana pendidikan

yang baik memerlukan anggaran yang cukup untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini.



APBD merupakan salah satu dokumen rencana kinerja dari aspek finansial, dimana anggaran itulah yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pembangunan daerahnya. Sedangkan indikator kinerja kegiatan pembangunannya adalah ukuran kuantitatif pada kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan yang dikategorikan dalam masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts) kegiatan pembangunan daerah tersebut. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Dari berbagai indikator tersebut, dapat diketahuilah sejauh mana tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran yang direncanakan dengan realisasinya terhadap pembangunan daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi yang berada di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah membawa konsekuensi kepada Provinsi Sulawesi Selatan harus memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan serta berkewajiban untuk mendanai kegiatan pendidikan.

Selanjutnya tentang alasan pendidikan untuk memilih studi kasus Pemerintah Sulawesi Selatan adalah bahwa Sulawesi Selatan merupakan Provinsi di Indonesia yang sudah mampu menyelenggarakan APBD yang mandiri, pelaksanaan Pembangunan di Sulawesi Selatan didasari oleh paradigma pertumbuhan yang didalamnya juga mengandung unsur pemberdayaan masyarakat dan pemeratan.

Secara khusus, mengapa penelitian ini dirasa perlu dilakukan, bahwasanya ada beberapa yang terjadi di Sulawesi Selatan berkaitan dengan Realisasi tata kelola anggaran pembangunan sektor pendidikan. Sulawesi Selatan dalam Penyelenggarakan pendidikan menghadapi permasalahan pendidikan menyangkut sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidikan, tenaga pendidik serta keperluan sekolah lainnya. Sebelum Otonomi Daerah, banyak program-program pembangunan bidang pendidikan yang belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan dana dari pemerintah yang selalu tersentralisir di pemerintah pusat. Banyak sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, gedung sekolah rusak, dan lain sebagainya. Masi banyak guru yang maksimal hanya mempunyai jenjang pendidikan sampai D2 dan D3.

Kondisi Permasalahan pendidikan lainnya adalah keterbatasan dana APBD dan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk prioritas sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketentuan anggaran pendidikan dalam UU No.20/2003 pasal dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ayat 1).

### 1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsistensi Anggaran Pendapatan Belanja daerah dengan Realisasi tata kelola anggaran pembangunan di sektor pendidikan pemerintah Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2015 yang dilihat dari aspek finansial.
2. Bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas tata kelola anggaran pembangunan di sektor pendidikan yang teralokasi dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilihat dari realisasi anggaran, rencana belanja sektor pendidikan Pemerintah Sulawesi Selatan

### 1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis konsistensi Anggaran Pendapatan Belanja daerah dengan Realisasi tata kelola anggaran pembangunan di sektor pendidikan pemerintah Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2015 yang dilihat dari aspek finansial.
2. Untuk Menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas tata kelola anggaran pembangunan di sektor pendidikan teralokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilihat dari realisasi anggaran, rencana belanja sektor pendidikan Pemerintah Sulawesi Selatan 2013-2015.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni melalui pengumpulan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan dalam upaya penyusunan landasan teori yang sangat berguna dalam pembahasan selanjutnya. Literatur-literatur tersebut dapat berupa buku, laporan, artikel, jurnal atau majalah dan lain-lain yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

### 2.1. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis pengukuran kinerja. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi efisiensi APBD terhadap realisasi tata kelola anggaran pembangunan di sektor pendidikan Pemerintah Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2015, dengan menggunakan 2 tahap

### 2.2. Perspektif finansial

Robert S. Kaplan dan David P. Norton (1996) mengemukakan bahwa perspektif finansial melihat kinerja menggunakan sudut pandang profitabilitasketercapaian target keuangan, sehingga didasarkan atas *sales growth, return of investment, operating income dan cash flow*.

1. Rasio Penerimaan APBD

$$\text{Rasio Penerimaan} = \frac{\text{Penerimaan APBD tahun } x}{\text{Total penerimaan tahun } x \text{ samapi } y} \times 100\%$$

2. Rasio Peneluaran APBD

$$\text{Rasio Peneluaran} = \frac{\text{Pengeluaran APBD tahun } x}{\text{Total pengeluaran tahun } x \text{ samapi } y} \times 100\%$$

3. Rasio Pengeluaran APBD untuk sektor Pendidikan (penerimaan dana pendidikan)



$$\frac{\text{Pengeluaran APBD untuk sektor pendidikan tahun } x}{\text{Total pengeluaran APBD u/ sektor pendidikan th } x \text{ samapi } y} \times 100\%$$

4. Rasio Penerimaan Dana Pembangunan Sektor Pendidikan

$$\frac{\text{Penerimaan dana pembangunan sektor pendidikan tahun } x}{\text{Penerimaan dana pembangunan sektor pendidikan th } x \text{ samapi } y} \times 100\%$$

5. Rasio Pengeluaran Dana Pendidikan

$$\text{Rasio Pengeluaran} \frac{\text{Ppengeluaran dana pendidikan tahun } x}{\text{pengeluaran dana pendidikan tahun } x \text{ samapi } y} \times 100\%$$

6. Rasio Pengeluaran Dana Pembangunan Sektor Pendidikan

$$\frac{\text{pengeluaran dana pembangunan sektor pendidikan tahun } x}{\text{pengeluaran dana pembangunan sektor pendidikan th } x \text{ samapi } y} \times 100\%$$

**2.3. Efektivitas dan Efisiensi**

**2.3.1 Efektivitas**

Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun Kriteria Efektivitas yaitu:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efektivitas berimbang.

Tabel 1 Tingkat Efisiensi APBD (INPUT & OUTPUT)

Tahun	Realisasi Belanja Dana Pendidikan (Rp)	Realisasi Pendapatan Dana Pendidikan (Rp)	Efisiensi (%)
2013	1.458.221.116,231	1.587.328.117.453	91.87
2014	1.673.121.016,432	1.787.253.551.431	93.61
2015	3.521.223,151,023	3.783.123.514.421	93.07

Sumber: Data diolah 2018

Mengacu kepada metode penelitian tersebut diatas tentang pedoman penelitian dan kemampuan keuangan, maka kriteria pengelolaan keuangan daerah tersebut dikatakan cukup efisiensi, karena bernilai 90% sampai 100%. Grafik berikut memperlihatkan perkembangan tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2015

Dari grafik di bawah dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada 2014, dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik.

3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti tidak efektif.
- 2.3.2. Efisiensi

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi :

$$\frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

2.3.3. Kriteria efisiensi sebagai berikut :

1. Jika diperoleh kurang dari 100% (x<100%) berarti efisien
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efisiensi berimbang
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti tidak efisien

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

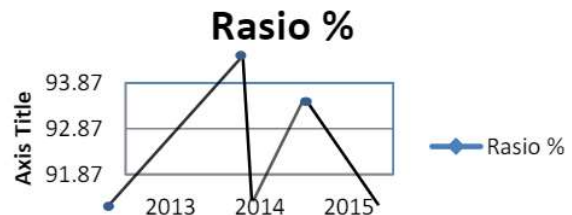
**3.1. Efisiensi dan Efektivitas**

3.1.1. Efisiensi

Efisiensi pengelolaan biaya pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan per tahun dalam prosentase adalah:

$$\text{Efisiensi} \frac{\text{Realisasi belanja dana pendidikan tahun } x}{\text{Realisasi Pendapatan dana pendidikan tahun } x} \times 100\%$$

Efisiensi disini adalah membandingkan antara *input* dan *output*. *Input* secara teori adalah realisasi belanja untuk memperoleh pendapatan, biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi dana pendidikan (dana yang diperoleh dari APBD) sebelum digunakan untuk belanja kekinisan. *Output* secara teori adalah realisasi pendapatan, pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi dana pendidikan yang teralokasi dari APBD.



Gambar 1 Tingkat Efisiensi

Berdasarkan estimasi di atas maka tujuan kedua dari penelitian ini terjawab dimana sesuai hipotesa kedua yang dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan realisasi tata kelola anggaran pembangunan di sektor pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2015 cenderung efisien.

Pernyataan tersebut sesuai (mendukung) dengan teori efisiensi yang menyatakan bahwa efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas dimana membandingkan antara rasio input dan output, dalam hal ini sektor pendidikan.

Efisiensi disini juga mendukung teori pembangunan ekonomi dimana dalam salah satu defenisinya mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitasnya sumber daya. Dengan defenisi ini pembangunan dapat dimaknai sebagai kegiatan nyata dan berencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada umumnya dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya sumber daya input yang ada (sesuai dengan prinsip efisiensi). Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas (sektor pendidikan).

Namun untuk melihat tujuan tata kelola anggaran pembangunan khususnya sektor pendidikan, efisiensi anggaran tidak cukup, karena produk barang/jasa yang digunakan untuk *social welfare* harus diperhatikan juga efektivitasnya. Secara umum, efisiensi anggaran selalu tidak sesuai dengan efektivitasnya, dengan kata lain, suatu tata kelola anggaran dikatakan efisien namun belum tentu efektif karena *outcome* nya tidak tercapai dengan *output* yang ada. Tetapi di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan efektivitasnya berimbang.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan dan saran-saran penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa program pendidikan selama tiga tahun dalam periode ini terlaksana dengan tingkat konsistensi 100% APBD.
2. Selama tiga tahun terakhir, anggaran pendidikan yang direalisasikan setelah dikurangi gaji guru jumlahnya masih kurang dari 100%, ini juga setara dengan anggaran pendidikan yang direalisasikan di beberapa daerah yang ada di Indonesia.
3. Dengan menggunakan Analisis Aspek Finansial dapat diketahui bahwa anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan teralokasikan 100% dengan kata lain apa yang sudah dianggarkan konsisten dengan realisasi pembangunan pendidikannya. Namun di sisi lain, kondisi ini mencerminkan nilai partisipasi masyarakat yang relatif kecil karena dalam penganggarnya masih cara yang terpetak-petak dengan sistem anggaran yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya.

4. Rasio APBD terhadap realisasi tata kelola anggaran sektor pendidikan cukup efisien karena karena nilainya di atas 90%(mendekati 100%) dan efektifitas berimbang senilai 100% yang ditunjukkan dengan kenaikan IPM sehingga lebih dari 70% dengan dominasi indeks pendidikan, nilai APK dan APM yang mengalami peningkatan, dan prestasi lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aryati Puspasari Abady, 2013. Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah. Makassar : Jurnal Studi Ilmu Administrasi Publik. Vol. III, No. 1di Akses 6 Maret 2018
- Abe, (2008). Perencanaan daerah Partisipatif, Pondok Edukasi Solo
- Adi Surya, Darwis, Syukri Abdullah. 2015. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Aceh : Jurnal Magister Akuntansi, Vol. 4, No. 3. 2302-0164. Di Akses 6 Maret 2018
- Abdurahmat dalam Othenk (2008). Teori Efisiensi. Jakarta: Erlangga.
- Bambang Ryanto, 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung Alfabeta.
- Bahrin Assidiqi, 2014 Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd)
- Dodo, H, dan Herman, W (2006). Manajemen Keuangan Lanjutan. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hasibuan. (2003). *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah. BPFE, Yogyakarta*
- (2005). *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah. BPFE, Yogyakarta*
- Horne dan wachowics. 2012. Manajemen Keuangan. Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hadi Suroso, Abdul Halim, Irwan Noor, 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Buyaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Sidoarjo : Jurnal Administrasi Publik. Vol.17, No.1. 1411-0199. Di Akses 6 Maret 2018
- Irwan dan Suparmoko, M. 1992. *Ekonomika Pembangunan : Edisi Kelima. BPFE, Yogyakarta.*
- Iskandar, Agus, 2012. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Lampung : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 3, No. 1. Di Akses 6 Maret 2018
- Julita, 2012. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia.* LP3S, Jakarta.
- Munandar. (2001). *Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja.* BPFE, Yogyakarta.
- Mariza, Addina (2009). *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan.* Proposal Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Muliana.2009. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten /Kota Diprovinsi Sumatera Utara. Sripsi.Universitas Sumatera Utara: Sumetara Utara. Di akses 7 agustus 2018.
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nurkholis. (2002). *Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang* www.pendidikan-network.org. id. 1.03.2018.
- Nicholson (2003) dalam Rica Amanda (2010). Teori Efisiensi. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi. H. Nawawi (2003). *Perencanaan SDM Untuk Organisasi profit yang Kompetitif*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nidya Putri, Sjamsiar Sjamsuddin, Ratih Nur Pratiwi, 2005. Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD dalam Perspektif Kepemerintahan yang baik. Malang : Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1. No.4. 101-109. di Akses 6 Maret 2018
- Ni Nyoman, Sri Ayu Lestari, I Wayan Bahagia, Gede Putu Agus Susila Jana, 2015. Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Lansung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : e Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Vol. 3. di Akses 6 Maret 2018
- Parawironegoro, 2007. Manajemen Keuangan. GrahaIlmu, Yogyakarta.
- Rinusu dan Sri Mastuti, (2003). Panduan Praktis Mengontrol APBD. *Civic Education and Budget Transparency Advocation* (Ciba) dan *Friendrich Ebert Stiftung* (FES), jakarta.
- Samsubar Saleh (2000). Teori Efisiensi.Jakarta, Erlangga
- Strees dalam Tangkilisan (2005). Kriteria Efektivitas. Jakarta, Erlangga
- Sondang dalam Othenk (2008). Teori Efisiensi. Jakarta: Erlangga
- Sunandar. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (UPKBKM) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal*.Jurnal. Dosen Program Studi Akuntansi Poloteknik Harapan Bersama. Di akses 6 Maret 2018